

## Zonasi kawasan wisata sejarah Monumen Kresek berbasis CBT (community-based tourism)

Yudi Hartono<sup>1\*</sup>, Andri Saputra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun, Jl. Setia budi No. 85 Madiun, Indonesia

Email: [yudihartono@unipma.ac.id](mailto:yudihartono@unipma.ac.id); [andrisaputraminato@gmail.com](mailto:andrisaputraminato@gmail.com)

Informasi artikel: Naskah diterima: 11/11/2021; Revisi: 25/11/2021; Disetujui: 25/1/2022

**Abstrak:** Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun telah mengembangkan kawasan wisata sejarah Monumen Kresek melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) "MEKAR". Kendala yang dihadapi adalah belum adanya kesepakatan tentang zonasi yang berdampak pada kurang tertata dan kurang jelasnya arah pengembangan wisata serta memunculkan masalah lain seperti pedagang dari luar daerah yang secara liar menempati tempat-tempat tertentu untuk membuka lapak dagangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah dalam penataan zona wisata sejarah Monumen Kresek dan memetakan zona wisata sejarah Monumen Kresek berbasis CBT (*Community-Based Tourism*). Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, FGD, dan studi dokumentasi. Penelitian terdiri dari 2 tahapan: 1) Menganalisis potensi dan masalah penataan zona kawasan wisata Monumen Kresek; dan 2) Memetakan zona wisata Monumen Kresek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan zonasi kawasan wisata sejarah Monumen Kresek, yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang. Zonasi kawasan wisata terdiri dari: pertama, area apa yang harus dipertahankan keasliannya; kedua area transisi yang berfungsi edukasi, dan ketiga zona komersial. Ketiga zona tersebut tidak boleh saling tumpang tindih.

**Kata kunci:** zonasi; wisata sejarah; CBT; Kresek

**Abstract:** Kresek Village, Wungu District, Madiun Regency has developed a historical tourism area for the Kresek Monument through the "MEKAR" Tourism Awareness Group. The obstacle faced is that there is no agreement on zoning which has an impact on being less organized and less clear on the direction of tourism development and giving rise to other problems such as traders from outside the area who illegally occupy certain places to open their wares. This study aims to identify the potential and problems in structuring the historical tourism zone of the Kresek Monument and to map the historical tourism zone of the Kresek Monument based on CBT (*Community-Based Tourism*). The research was conducted with a qualitative descriptive method. Data was collected through observation, interviews, FGDs, and documentation studies. The research consisted of 2 stages: 1) Analyzing the potential and problems of zoning the Kresek Monument tourism area; and 2) Mapping the Kresek Monument tourism zone. The results of the study indicate that it is necessary to zoning the historical tourism area of the Kresek Monument, namely the core zone, buffer zone, development zone, and support zone. The zoning of tourist areas consists of: first, what areas must be preserved in their originality; the second is a transitional area that functions as an education, and the third is a commercial zone. The three zones must not overlap each other.

**Keywords:** zoning; historical tourisms; CBT; Kresek

### Pendahuluan

Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pengembangan sektor ekonomi kreatif yang menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional saat ini. Banyak manfaat dari pengembangan pariwisata. Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang terbukti mampu

mengentaskan kemiskinan di daerah karena dalam pengelolaan pariwisata akan memiliki trickle down effect bagi masyarakat lokal (Rohim, 2013)). Terlebih pengembangan wisata berbasis masyarakat yang menekankan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan dan manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan (Usman, 2008). Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan desa dengan berbagai potensi wisata, diantaranya kawasan wisata sejarah Monumen Kresek, wisata alam Grape, wisata tani Kajar, wisata edukasi “Sapi Perah”, dan wisata Nongko Ijo Kare. Kresek merupakan daerah subur dengan ketersediaan air yang melimpah dari mata air gunung Wilis. Panorama gunung Wilis juga menambah keasrian desa ini. Kawasan wisata sejarah Monumen Kresek merupakan wisata unggulan Desa Kresek. Monumen ini menggambarkan peristiwa Pembontakan PKI di Madiun 1948. Bagi masyarakat Madiun, peristiwa tersebut meninggalkan memori kolektif dan luka batin yang dalam. Syafii Maarif dalam Soe Hok Gie (1999) menyebut Peristiwa Madiun 1948 meninggalkan segala luka dan memori kolektif traumatik (Gie, 1999). Monumen Kresek dibangun untuk mengenang pejuang yang gugur dalam peristiwa tersebut.

Monumen Kresek merupakan kawasan wisata sejarah dan budaya yang dikelilingi panorama alam. Keberadaan Monumen Kresek semakin memiliki signifikansi sosial bagi masyarakat setempat dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Monumen Kresek menjadi kawasan wisata sejarah yang banyak dikunjungi, terutama saat musim liburan dan akhir pekan. Pada akhir pekan mencapai 500 orang per hari, sedangkan saat musim liburan seperti Lebaran maupun tahun baru bisa mencapai ribuan orang per hari (Madiunpos.com, 22/1/2018). Kawasan wisata sejarah Monumen Kresek telah dikembangkan cukup lama. Masyarakat terlibat aktif melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “MEKAR” yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Kresek, merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017– 2032. Penelitian Soemardiono, dkk menunjukkan partisipasi aktif masyarakat melalui Pokdarwis “MEKAR” seperti dalam pengembangan infrastruktur pendukung wisata, menghilangkan stigma angker dari monumen Kresek melalui berbagai kegiatan publikasi yang rekreatif, dan pengembangan objek wisata baru di sekitar monumen (Soemardiono, B., Hartono, Y., Soebijantoro, 2021).

Salah satu masalah yang dihadapi adalah belum adanya kesekapatan tentang zonasi. Masalah tersebut selain berdampak pada kurang tertata dan kurang jelasnya arah pengembangan, juga memunculkan masalah lain seperti pedagang dari luar daerah yang secara liar menempati tempat-tempat tertentu untuk membuka lapak dagangannya. Pemerintah desa dan masyarakat setempat tidak memiliki landasan yang kuat untuk menatanya. Modal sosial berupa partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan wisata sejarah Monumen Kresek menjadi penting dalam penataan zona wisata sejarah Monumen Kresek dalam kerangka pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/CBT*). Penelitian ini akan merancang penataan zona wisata sejarah Monumen Kresek berbasis CBT sebagai acuan pengembangan kawasan wisata sejarah Monumen Kresek. Penelitian bertujuan memetakan zona wisata sejarah Monumen Kresek berbasis CBT (*community based tourism*) sebagai acuan pengembangan

kawasan wisata sejarah Monumen Kresek sehingga arah pengembangan kawasan wisata sejarah Monumen Kresek menjadi lebih jelas dan memiliki landasan yang kuat dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk menggali problem zonasi wisata kawasan wisata sejarah Monumen Kresek.

## **Metode**

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan karena jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif. Proses yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi, terutama dalam mendapatkan informasi pada tiap individu, adalah dengan cara menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus (Sugiyono, 2008). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di kawasan wisata sejarah Monumen Kreses. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disistematisasikan berdasarkan gambaran awal yang didapat maupun secara bebas dengan melakukan diskusi (FGD) yang terkait dengan topik penelitian. Informan penelitian ini adalah ahli pariwisata, ahli sejarah, pemerintah daerah, kepala desa, Pokdarwis, dan masyarakat setempat. Pemilihan informan dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan data. Selain data primer, juga mengumpulkan data sekunder berupa profil desa, profil Monumen Kresek, dan data-data wilayah secara umum, serta data wisata di lokasi penelitian dari sumber buku dan literatur lain, serta penelusuran berbagai informasi yang dipublikasikan dalam media elektronik maupun cetak. Alur dalam mendapatkan data penelitian diawali dengan mengungkap sejarah dan perkembangan kawasan wisata sejarah Monumen Kresek. Data sejarah dan perkembangan diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan ahli sejarah, pemerintah daerah, kepala desa, Pokdarwis, dan masyarakat setempat. Data sejarah dan perkembangan dianalisis deskriptif kualitatif. Data sejarah dan perkembangan kawasan wisata sejarah Monumen Kresek dijadikan acuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah penataan zona wisata. Data potensi dan masalah penataan zona wisata Monumen Kresek dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Variabel yang akan ditanyakan berdasarkan kajian literatur yang sudah dianalisis. Variabel tersebut diantaranya adalah mengenai perkembangan kondisi monumen, objek/atraksi dan daya tarik wisata, transportasi, infrastruktur, akomodasi (tempat menginap), usaha makanan dan minuman, jasa pendukung lainnya, informasi, promosi, kebudayaan lokal, dan aktivitas perilaku masyarakat. Data tersebut kemudian dianalisis deskriptif guna mendapatkan potensi dan masalah dalam penataan zona wisata Monumen Kresek.

## **Hasil dan Pembahasan**

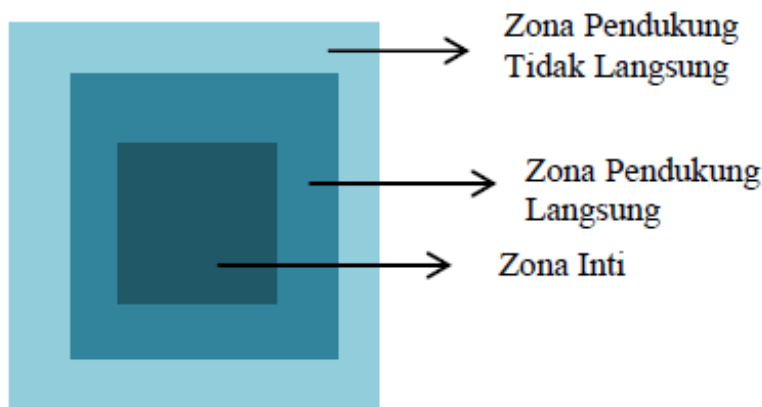
### **Zonasi wisata**

Zonasi wisata digunakan untuk mempermudah menentukan kebijakan pengembangan wilayah (Waidah, 2015). Adanya peraturan zonasi yang jelas untuk melindungi kawasan

konservasi agar tetap terjaga. Aturan zonasi ini juga berfungsi untuk memberikan arahan pengembangan dan pelestarian kawasan (Atsnansyah, M.M., Kusuma Dewi, 2015). Sasono & Umilia dalam penelitian studi kasus wisata budaya mengungkap bahwa secara spasial pengembangan kawasan wisata budaya dapat dilakukan dengan penentuan zona wisata yang menggunakan teknik overlay. Analisa overlay bertujuan menentukan zona wisata pada kawasan wisata budaya, setelah mengetahui penyusun dari setiap zona. Berikut adalah pembagian zona wisata budaya hasil dari analisis overlay (Sasono, A.P.M., & Umilia, 2015).

**Gambar 1**

*Penyusunan zona kawasan wisata*



Setiap zona memiliki fungsinya sendiri. Zona inti adalah zona yang disusun oleh variabel daya tarik seperti ketersediaan bangunan bersejarah; pentas dan pagelaran festival; daya tarik indoor seperti bangunan cagar budaya; daya tarik outdoor dalam hal ini ketersediaan elemen path, nodes, districts, dan landmark; serta kondisi situs. Zona pendukung langsung memiliki penyusun dari ketersediaan akomodasi yang dilihat dari jarak akomodasi, ketersediaan jaringan jalan, dan ketersediaan transportasi. Zona pendukung tidak langsung memiliki penyusun kawasan disekitar Jalan Besar Ijen yang tidak memiliki konsentrasi variabel didalamnya, serta ditambah bangunan rumah bersejarah yang berubah bentuk maupun fungsi. Penyusunan zona didasari oleh hasil observasi kondisi lapangan dan pendapat pemerintah yang juga memiliki pandangan yang sama dalam menentukan zona kawasan pariwisata. Dari penyusun zona yang telah disebutkan, lalu kemudian dipetakan, sehingga diketahui daerah atau kawasan mana saja yang menjadi zona pengembangan. Selanjutnya peta tersebut di overlay dengan alat analisis Geographic Information System (GIS) sehingga menghasilkan tiga zona pengembangan. Untuk mendapatkan rumusan kriteria diperlukan pendekatan kebijakan yang didasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.18/HM.001/MKP/2011, yakni dengan membuat rumusan kriteria dibagi menjadi dua setiap zona, yaitu fisik dan non fisik. Atsnansyah & Kusuma Dewi dalam studi kasus kawasan Situs Cagar Budaya merumuskan arahan pengembangan dengan terlebih dahulu menetapkan zonasi pada kawasan tersebut. Penentuan zonasi dilakukan

dengan analisis delphi dengan meminta pendapat dari beberapa ahli. Hasil dari analisis delphi kemudian dikomparasikan dengan UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 untuk menghasilkan arahan zonasi dengan pembagian sebagai zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang. Zona inti merupakan kawasan utama penemuan fosil yang menjadi ikon dan daya tarik Kawasan Situs Cagar Budaya. Pada kawasan inti terdapat radius pemeliharaan zona inti adalah 500 m dari lokasi penemuan. Jarak 500 m didapatkan dari hasil konsensus atau kesepakatan dari analisis delphi. Dalam menjaga zona inti maka dilakukan tindakan pelestarian secara dinamis dan aktif, yaitu konservasi pada kawasan inti. Selain itu juga harus ada sterilisasi zona inti dari kegiatan manusia, yaitu dengan memberikan barrier antara lokasi inti dengan aktivitas manusia. Kegiatan yang dilakukan di zona ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan kegiatan pelestarian. Zona penyangga merupakan area yang melindungi zona inti yang berkaitan dengan tindakan pelestarian dan aktivitas kegiatan masyarakat. Lokasi zona penyangga terletak pada radius 500 m dari zona inti terluar. Jarak 500 m didapatkan dari hasil konsensus atau kesepakatan dari analisis delphi.

Kegiatan yang berada di lokasi zona penyangga ada kegiatan yang dilakukan dengan komunitas masyarakat untuk melestarikan situs cagar budaya yang berupa peningkatan pemeliharaan melalui perawatan di sekitar lokasi titik temu, agar kondisi lahan tidak terjadi alih fungsi oleh kegiatan manusia. Mengadakan kerjasama antara komunitas, kelompok sadar wisata, pemerintah dan masyarakat. Tujuan kerjasama ini adalah untuk melindungi situs cagar budaya. Zona Pengembangan merupakan kawasan yang secara langsung mendukung kegiatan wisata cagar budaya yang merupakan pusat dari fasilitas pelayanan kegiatan pariwisata yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga wisatawan seperti perdagangan jasa. Zona pengembangan berada kurang lebih sekitar 500 m – 1 km dari zona penyangga. Jarak 500 m – 1 km didapatkan dari hasil konsensus atau kesepakatan dari analisis delphi. Pada zona pengembangan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan tindakan pemeliharaan terhadap objek wisata alam dan wisata budaya, agar tetap terjaga kelestariannya. Dalam menjaga kebudayaan lokal, maka harus lebih banyak diadakan pagelaran seni. Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat lokal untuk lebih menjaga dan mewarisi tradisi lokal.

Zona penunjang adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Zona penunjang pengembangan kawasan wisata budaya terletak pada radius 500 m dari zona pengembangan. Jarak 500 m didapatkan dari hasil konsensus atau kesepakatan dari analisis delphi. Pada zona ini juga harus tersedia sarana akomodasi dan sarana pendukung wisata serta berbagai sarana penunjang lainnya. Selain itu juga harus tersedia sarana pariwisata berupa gedung pertunjukkan budaya lokal, museum, galeri seni dari masyarakat lokal serta penyediaan lahan untuk perbelanjaan sebagai pendukung wisata budaya. Zona penunjang merupakan lokasi yang tepat sebagai sarana meningkatkan promosi (informasi) cagar budaya secara langsung (fisik) dan meningkatkan promosi (informasi) cagar budaya secara tidak langsung (non fisik). Upaya dalam mendukung pengembangan kawasan wisata budaya di Kawasan Situs Cagar Budaya juga perlu untuk menyediakan signage sebagai penanda untuk sarana informasi di beberapa objek wisata,

membangun penginapan berupa homestay yang berijin resmi untuk mendekatkan wisatawan kepada kebudayaan lokal.

### ***Community based tourism/CBT***

Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT) merupakan pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma yang berkelanjutan (sustainable development paradigm). CBT memberi peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat bukan merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global. Masyarakat setempat memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka (Usman, 2008). Suansri mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya (Suansri, 2001). Pembangunan pariwisata berkelanjutan, merupakan pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu. dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan. dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan (Rizkiyanto, N., 2018).

Pariwisata dilihat sebagai sebuah fenomena sosial dan industri pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi dunia hingga paruh akhir abad 20. Pariwisata telah menjadi kekuatan ekonomi utama di banyak negara dan wilayah di seluruh dunia, yang mengubah pola kerja, standar hidup, dan distribusi pendapatan (Soebijantoro, 2021). Sebagai contoh pembangunan destinasi wisata Mloko Sewu di Desa Pupus Ponorogo dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat, peningkatan kedudukan pengelola Mloko Sewu dalam kehidupan sosial masyarakat, peningkatan pemasukan warga yang membuka usaha di dekat wisata Mloko Sewu, terciptanya peluang kerja, disamping dapat menimbulkan potensi penyimpangan sosial (DA Maharani, M Hanif, 2021). Banyak potensi wisata di tingkat lokal yang membutuhkan partisipasi masyarakat lokal. Di Madiun, Situs Sunan Rejodanu potensial sebagai wisata sejarah dan wisata religi (Imelda Eka Aprilia & Anjar Mukti Wibowo, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata terdiri dari atas dua maksud, yaitu dalam mekanisme pengambilan keputusan dan partisipasi dalam menerima keuntungan dari pengelolaan wisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat, yaitu: a) Melibatkan masyarakat dalam pengambilan; keputusan; b) Terdapat kepastian masyarakat lokal menerima manfaat; c) Pemberihan edukasi tentang pariwisata kepada masyarakat lokal (Sunaryo, 2013). Dalam konsep CBT terkandung didalamnya konsep pemberdayaan masyarakat yang selalu dihubungkan dengan karakteristik masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan menciptakan kondisi dan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai

macam strategi, yaitu: 1) Property dan karakter yang lebih unik diorganisasi dalam skala yang kecil. Jenis pariwisata ini secara ekologis aman dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional; 2) Mengembangkan objek-objek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal; 3) Komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan wisata dan itu lebih memberdayakan masyarakat (Nasikun, 2000). Pola pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan objek wisata menitikberatkan kepada partisipasi masyarakat. Diberdayakan dalam arti filosofi hidup di masyarakat, pendidikan, keterampilan, sikap/tata krama, aturan bermasyarakat, adat, bahkan sampai pada penampilan masyarakat itu sendiri (Sastrayuda, 2010). Masyarakat terlibat dalam pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga ada jaminan pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuan yang ikut dipertimbangkan.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat secara partisipatif. Munculnya partisipasi masyarakat mendasarkan atas dua perspektif, yaitu pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan, program yang akan mewarnai kehidupan masyarakat, dan kedua; partisipasi transformasional sebagai tujuan untuk mengubah kondisi lemah dan marginal menjadi berdaya dan mandiri. Pencitraan berupa penampilan masyarakat maupun penampilan lingkungan yang ada juga merupakan suatu daya tarik yang tidak kalah pentingnya dalam mendatangkan dan ketertarikan wisatawan. Oleh karena itu perlu dipelihara dan dipertahankan terutama penampilan yang membuat wisatawan merasa aman, tenteram, dan menimbulkan semangat hidup untuk berkarya dan bersikap ke arah yang lebih baik. Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat juga merupakan kunci pengembangan kepariwisataan. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan dalam menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan, baik berupa keterampilan dalam menerima atau keterampilan dalam menyuguhkan berbagai atraksi maupun informasi yang dibutuhkan, sampai pada keterampilan dalam membuat berbagai cinderamata yang khas dan yang diminati oleh wisatawan.

Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sangat berkaitan erat dengan kreativitas dan ide-ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat, oleh karena itu pembinaan kreativitas harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Yaman & Mohd menggarisbawahi beberapa kunci pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitu: pertama, adanya dukungan pemerintah. CBT membutuhkan dukungan struktur yang multi institusional agar sukses dan berkelanjutan. Pendekatan CBT berorientasi pada manusia yang mendukung pembagian keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung pengentasan kemiskinan dengan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga SDA dan budaya. Pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator, koordinator atau badan penasehat SDM dan penguatan kelembagaan (Yaman, A.R & Mohd, 2004). Kedua, partisipasi dari stakeholder. CBT didiskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Konservasi sumber daya juga dimaksudkan sebagai upaya melindungi dalam hal memperbaiki mata pencaharian /penghidupan

masyarakat. CBT secara umum bertujuan untuk penganeekaragaman industri Peningkatan skope par -tisipasi yang lebih luas ini termasuk partisipasi dalam sektor informal, hak dan hu-bungan langsung/tidak langsung dari sektor lainnya. Pariwisata berperan dalam pembangunan internal dan mendorong pembangunanan aktiv itas ekonomi yang lain seperti industri, jasa dan sebagainya. Anggota masyarakat dengan kemampuan kewirausahaan dapat menentukan/membuat kontak bisnis dengan tour operator, travel agent untuk memulai bisnis baru. Menjadi seorang entreprenuer diperlukan sikap kemandirian dalam mencari peluang sekaligus mandiri dalam menanggung segala resiko. Sikap tersebut dapat dibangun apabila tersedia bahan ajar yang berisi wawasan yang jelas akan peluang ekonomi serta resiko yang harus dihadapi (Soebijantoro, Furqon Hidayatullah, Syamsi Hariyanto, 2019). Ketiga, pembagian keuntungan yang adil. Ti dak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha di sector pariwisata tetapi juga keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memilki usaha. Keuntungan tidak langsung yang diterima masyarakat dari kegiatan ekowisata jauh lebih luas antara lain berupa proyek pembangunan yang bisa dibiayai dari hasil penerimaan pariwisata.

Keempat, penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan. Salah satu kekuatan ekowisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat. Di mana aset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan. Hal itu bisa menumbuhkan kepedulian, penghargaan diri sendiri dan kebanggaan pada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian sumber daya yang ada menjadi lebih meningkat nilai, harga dan menjadi alasan mengapa pengunjung ingin datang ke desa. Kelima, penguatan institusi lokal. Pada awalnya peluang usaha pariwisata di daerah pedesaan sulit diatur oleh lembaga yang ada. Penting untuk melibatkan komite dengan anggota berasal dari masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya dan pengunjung. Hal ini jelas membutuhkan perkembangan kelembagaan yang ada di sana. Yang paling baik adalah terbentuk lembaga dengan pimpinan yang dapat diterima semua anggota masyarakat. Penguatan kelembagaan bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan individu dengan ketra mpilan kerja yang diperlukan (teknik, managerial, komunikasi, pengalaman kewirausahaan, dan pengalaman organisasi. Penguatan kelembagaan dapat berbentuk forum, perwakilan, dan manajemen komite. Keenam, keterkaitan antara level regional dan nasional. Kom unitas lokal seringkali kurang mendapat link langsung dengan pasar nasional atau internasional, hal ini menjadi penyebab utama mengapa manfaat ekowisata tidak sampai dinikmati di level masyarakat. Perantara yaitu yang menghubungkan antara aktifitas ekowisata dengan masyarakat dan turis justru memetik keuntungan lebih banyak.

### **Zonasi kawasan wisata sejarah Monumen Kresek**

Monumen Kresek di Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan kawasan wisata sejarah dan budaya yang dikelilingi panorama alam. Penelitian Soemardiono, dkk (2019) menunjukkan bahwa masyarakat dalam pengembangan wisata Monumen Kresek



melalui Pokdarwis “MEKAR” seperti dalam dalam pengembangan infrastruktur pendukung wisata, menghilangkan stigma angker dari monumen Kresek melalui berbagai kegiatan publikasi yang rekreatif, dan pengembangan objek wisata baru di sekitar monumen. Motivasi dan inisiatif warga cukup tinggi untuk mengembangkan kawasan wisata, namun belum mendapat fasilitasi yang memadai dari para pemangku kepentingan di desa Kresek. Sinergitas kebijakan diantara para pemangku kepentingan sering menjadi kendala untuk pengembangan kawasan wisata Desa Kresek. Salah satu masalah yang dihadapi adalah belum adanya kesepakatan tentang zonasi. Masalah tersebut selain berdampak pada kurang tertata dan kurang jelasnya arah pengembangan, juga memunculkan masalah lain seperti pedagang dari luar daerah yang secara liar menempati tempat-tempat tertentu untuk membuka lapak dagangannya. Pemerintah desa dan masyarakat setempat tidak memiliki landasan yang kuat untuk menatanya.

Untuk mengatasi beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam zonasi wisata, maka diadakan FGD dengan mengundang para stakeholder. Hasil analisis potensi dan masalah kemudian dieksplorasi untuk menentukan zonasi dan arahan pengembangannya melalui FGD. Para ahli diminta mengkaji hasil FGD, kemudian diberikan kewenangan untuk merancang penataan zona wisata ke dalam 4 zona, yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang. FGD merumuskan hasil-hasil zonasi kawasan wisata, yaitu pertama, area apa yang harus dipertahankan keasliannya; kedua area transisi yang berfungsi edukasi, dan ketiga zona komersial. Ketiga zona tersebut tidak boleh saling tumpang tindih. Peran Pokdarsis sejauh ini cukup baik sebagai penggerak dan komunikator pengembangan wisata di lapangan, menjaga sapta pesona, dan menggerakkan kreativitas kuliner.

## **Kesimpulan**

Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun telah mengembangkan wisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT) melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “MEKAR”. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya kesepakatan tentang zonasi yang berdampak pada kurang tertata dan kurang jelasnya arah pengembangan wisata serta memunculkan masalah lain seperti pedagang dari luar daerah yang secara liar menempati tempat-tempat tertentu untuk membuka lapak dagangannya. Untuk mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi dalam zonasi wisata, maka diperlukan penataan zona wisata ke dalam 4 zona, yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang. Zonasi kawasan wisata terdiri dari pertama, area apa yang harus dipertahankan keasliannya; kedua area transisi yang berfungsi edukasi, dan ketiga zona komersial. Ketiga zona tersebut tidak boleh saling tumpang tindih.

## **Daftar Pustaka**

Atsnansyah, M.M., Kusuma Dewi, D. . (2015). Arahan Zonasi dan Pengembangan Di Kawasan Situs Cagar Budaya Patiayam Kabupaten Kudus. *Teknik*, 36(2), 96–104.

- DA Maharani, M Hanif, P. P. (2021). Dampak Pembangunan Destinasi Wisata Mloko Sewu Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Pupus Kecamatan Ngebel. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(5), 790–802. <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/168>
- Gie, S. . (1999). *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Imelda Eka Aprilia, Anjar Mukti Wibowo. (2021). Situs Sunan Rejodanu Desa Pucang Rejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Sebagai Wisata Sejarah Dan Religi. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 11(1), 108–119. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.8219>.
- Nasikun. (2000). Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas. In F. & Mukhlison (Ed.), *Pengusahaan Ekowisata* (pp. 26–27). Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Rizkianto, N., & T. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 58(2), 20–26.
- Rohim. A. (2013). *Pengembangan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata*. Yogyakarta: : Pustaka Pelajar.
- Sasono, A.P.M., & Umilia, E. (2015). Kriteria Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Jalan Besar Ijen Kota Malang. *Jurnal Teknik ITS*, 4(2), 100–103.
- Sastrayuda, G. . (2010). *Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure*. Yogyakarta: AMPTA Press.
- Soebijantoro, Furqon Hidayatullah, Syamsi Hariyanto, S. H. (2019). PENGUATAN BAHAN AJAR ENTREPRENUER SEJARAH BERBASIS ELECTRONIC PUBLICATION MELALUI ANALISA KEBUTUHAN MAHASISWA DAN STAKE HOLDER. In Ikhsanudin (Ed.), *Proceedings International Conference on Teaching and Education (ICoTE)* (pp. 1–8). Universitas Tanjung Pura. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/icote/article/view/33887>.
- Soebijantoro. (2021). *Entrepreneur sejarah (sumber elektronik)*. Madiun: CV. AE Media Grafika.
- Soemardiono, B., Hartono, Y., S. (2021). Community-Based Tourism in Kresek Village, Madiun, East Java. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events*, 5(1), 22–31. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31940/ijaste.v5i1.2366>.
- Suansri, P. (2001). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Usman, S. (2008). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waidah, A. (2015). Zonasi Pariwisata Berdasarkan Potensi Sumber Daya Tarik Wisata (SDTW) di Kabupaten Kebumen Berbantuan Sistem Informasi Geografis. *Geo Educasia*, 2(3), 334–344.

Yaman, A.R & Mohd, A. (2004). Proportion for Sustainable Development and Environment Conservation in Malaysia. *Journal of Applied Science*, 4(4), 583-589. <https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.2006.00156.x>.